

LAPORAN KINERJA BNSP

Tahun 2022

**SEMAKIN
KUKUH MELALUI
TRANSFORMASI
DIGITAL**

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Laporan Kinerja BNSP Tahun 2022
SEMAKIN KUKUH MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL

©2023 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pengarah : Kunjung Masehat, S.H., M.M.
Penanggung Jawab : Miftakul Azis, M.H.
Penyelia : Drs. Mulyanto, M.M.
Bonardo Aldo Tobing, BSBA
Tetty Desiarti Soemarso Ariyanto, S.ST.Par., M.Par.
Henny S. Widyaningsih, M.Si.
Drs. Muhammad Zubair, M.Si. AIIS
Koordinator : Henny S. Widyaningsih, M.Si.
Tim Penulis : Data dan Informasi BNSP
Editor : Bambang Trimansyah
Desainer : Den Binikna

Januari, 2023
viii + 58 hlm.; 21 x 29,7 cm
Fon: Mulish oleh Vernon Adams, Cyreal, Jacques Le Bailly

Diterbitkan oleh

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Jl. Letjen MT Haryono, Kav. 52,
RT.3/RW.4, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 13630
Telepon: 021-7992685
Surel: admin@bnsf.go.id
Situs web: bnsf.go.id

KATA PENGANTAR

KETUA BNSP

“Semakin Kukuh Melalui Transformasi Digital” menjadi pilihan tema laporan kinerja BNSP tahun 2022 seiring dengan digitalisasi pelayanan BNSP yang dilakukan sepanjang tahun 2022 guna meningkatkan pelayanan BNSP kepada para pemangku kepentingan. Digitalisasi telah menjadi isu dalam meningkatkan pelayanan publik di lembaga pemerintah. Salah satu hikmah terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 adalah dorongan percepatan digitalisasi di semua sektor.

Pemerintah meresmikan konsep Dilan (Digital Melayani) dalam meningkatkan pelayanan publik. Akan tetapi, perlu disadari bahwa optimalisasi penerapan teknologi digital bukan semata mengubah layanan manual/ analog menjadi layanan daring (*online*) melalui aplikasi, melainkan lebih daripada itu. Prinsip transformasi digital secara lebih luas adalah mengintegrasikan semua sektor layanan sehingga mengubah proses bisnis “tradisional” yang selama ini dijalankan menjadi proses bisnis modern dengan ciri cepat, akurat, dan hemat. Hal ini tentu akan menimbulkan nilai tersendiri di mata pemangku kepentingan atau pengguna layanan sehingga dapat memperkuat citra dan reputasi lembaga seperti BNSP.

E-Government Survey 2020 yang dilaksanakan oleh PBB menempatkan Indonesia pada peringkat ke-88 dari 193 negara dalam konteks implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Artinya, Indonesia masih perlu meningkatkan pelayanan digital. Pada Oktober 2022 PBB kembali merilis hasil *E-Government Survey*, posisi Indonesia naik secara signifikan menjadi peringkat ke-77. Dalam survei tahun 2022 itu, PBB mengusung tema “*The Future of Digital Government*”. Survei dibuat sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk

mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi penerapan SPBE.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang independen juga mengambil peran dalam transformasi digital ini. Disadari bahwa hal utama yang harus ditingkatkan adalah ketersediaan informasi. Untuk itu, BNSP mengawali transformasi digital dengan mengembangkan sistem informasi (Sisfo) berbasis web. Diharapkan hal ini bakal meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi pelayanan sertifikasi profesi.

Terkait dengan sertifikasi profesi telah terbit regulasi penting pada tahun 2022, yaitu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV). Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ditetapkan harus berbasis standar kompetensi kerja.

BNSP merespons Perpres ini dengan mengembangkan sistem sertifikasi di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi karena lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi wajib disertifikasi BNSP. Karena itu, BNSP turut mengembangkan LSP P-1 di berbagai bidang, baik di SMK maupun di perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.

Laporan Kinerja BNSP 2022 ini menggambarkan transformasi digital yang dilakukan BNSP berikut aktivitas pelayanan di berbagai bidang yang terus ditingkatkan serta kerja sama antarlembaga. BNSP bersiap bangkit kembali pascapandemi COVID-19 untuk lebih tangguh pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang sertifikasi.

Pada kesempatan ini, saya dan segenap Anggota BNSP perlu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat sertifikasi, yaitu asosiasi profesi, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, dan LSP yang telah melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja tahun 2022 dengan penuh semangat dan keseriusan. Semoga tahun ke depan akan lebih baik lagi.

Jakarta, Desember 2022

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Kunjung Masehat, S.H., M.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tema “Semakin Kukuh Melalui Transformasi Digital” dalam Laporan Kinerja BSNP 2022 menunjukkan strategi BSNP meningkatkan pelayanan berbasis teknologi digital. Secara khusus laporan kinerja ini memperlihatkan pelayanan BSNP dalam berbagai bidang, terutama terkait data dan informasi. BSNP pada tahun 2022 mengembangkan Sistem Informasi (Sisfo) berbasis web dengan merilis 16 aplikasi digital. Pengembangan tersebut bertujuan memperbarui dan memperkuat sistem informasi BSNP sehingga data-data dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, terutama oleh BSNP untuk mengambil keputusan dan kebijakan secara akurat dan akuntabel.

Melandainya pandemi COVID-19 pada tahun 2022 memberikan ruang kegiatan lebih leluasa bagi pelayanan BSNP, khususnya Bidang Lisensi dan Bidang Sertifikasi. Data LSP terlisensi tahun 2022 sebanyak 186 LSP, dengan perincian 95 LSP P-1, 15 LSP P-2, dan 76 LSP P-3. Menurun dibandingkan tahun 2021 sebanyak 178 LSP karena adanya pembekuan dan pencabutan lisensi LSP. Adapun data umum sertifikasi, yaitu tercapai 1.037.483 asesi, baik PSKK maupun sertifikasi mandiri. Angka ini meningkat dari realisasi tahun 2021 sebanyak 830.986 asesi.

Berdasarkan data Sumber Daya Sertifikasi 2022, terdapat 60.217 orang asesor yang terdaftar, 135 master asesor, dan 29.991 tempat uji kompetensi (TUK).

Pagu anggaran revisi BSNP sebesar Rp98.838.500.000. Target serapan anggaran 2022 adalah 98%. Hingga Desember 2022, realisasi serapan anggaran mencapai Rp93.005.517.074,00 atau 94,10% dari total pagu anggaran revisi.

Selain digitalisasi dan pelayanan lisensi/sertifikasi, BNSP juga merealisasikan berbagai kerja sama dengan lembaga lain dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman. Tercatat sebanyak lima nota kesepahaman ditandatangani melalui Bidang Kerja Sama, yaitu dengan LPJK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Otoritas Jasa Keuangan, dan KADIN DKI Jakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA BNSP

III

RINGKASAN EKSEKUTIF

V



BAB 1 PENDAHULUAN

1

- A. Latar Belakang 1
- B. Gambaran Umum Tahun 2022 3
- C. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BNSP 4
- D. Struktur Organisasi BNSP 6
- E. Sekretariat BNSP 6



BAB 2 PROFIL BNSP

7

- A. Sejarah Ringkas BNSP 7
- B. Dasar Hukum Sistem Sertifikasi Kompetensi 10
- C. Sarana dan Prasarana 11
- D. Jenis Layanan BNSP 13



BAB 3 CAPAIAN KINERJA

15

- A. Kinerja Bidang Lisensi 16
- B. Kinerja Bidang Sertifikasi 24
- C. Kinerja Bidang Hukum dan Kerjasama 32
- D. Kinerja Bidang Data dan Informasi 41
- E. Kinerja Bagian Umum 45



BAB 4 PENUTUP

51



DATA INFOGRAFIK BNSP

54





PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 menyisipkan *blessing in disguise* atau berkah tersembunyi di balik peristiwa yang membuat sebagian besar masyarakat terdampak hebat. Pembatasan aktivitas masyarakat dalam skala besar menyebabkan pemerintah memberlakukan *work from home* (WFH) pada hampir semua sektor, termasuk swasta.

Demi tetap berlangsungnya komunikasi dan koordinasi maka alternatif pertemuan-pertemuan dan pekerjaan secara virtual dilakukan. Pandemi pada akhirnya mempercepat proses digitalisasi sehingga penggunaan aplikasi berbasis internet meningkat dratis.

Ini lah berkah tersembunyi itu bahwa karena didorong oleh keadaan, digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan dan kepentingan. Tidak terkecuali bagi BNSP yang mengambil keputusan melaksanakan sertifikasi jarak jauh atau secara daring (*online*) untuk kali pertama pada tahun 2021. Beberapa LSP kemudian mengajukan permohonan agar dapat melaksanakan sertifikasi jarak jauh. BNSP melakukan validasi dan verifikasi kesiapan LSP menggunakan aplikasi berbasis internet untuk pelaksanaan sertifikasi tersebut.

Pelajaran berharga dari digitalisasi ini mendorong BNSP untuk mempercepat transformasi digital dengan meningkatkan pelayanan di bidang sertifikasi secara daring. BNSP mengembangkan belasan aplikasi daring berbasis web guna mendukung basis data dan informasi BNSP untuk para pemangku kepentingan. Percepatan ketersediaan data dan informasi ini semakin mendesak bagi BNSP demi pengambilan keputusan secara cepat, akurat, dan hemat.

Di tengah keterbatasan yang ada akibat pandemi COVID-19, BNSP tetap melaksanakan tugas pengembangan sistem sertifikasi nasional. Berbagai pencapaian kinerja telah dihasilkan sebagai jejak rekam dan evaluasi untuk masa yang akan datang.

Satu hal penting terkait regulasi bahwa pada tahun 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV). Perpres ini menjadi tonggak babak baru dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Menyikapi hal ini, BNSP mengambil peran dalam penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melalui sertifikasi kompetensi/profesi bagi peserta didik/peserta latih. Peserta didik/peserta latih wajib memiliki sertifikat kompetensi selain ijazah kelulusan dan sertifikat pelatihan.

Untuk itu, kerja cerdas, cergas, dan cepat perlu dilakukan BNSP guna meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui sertifikasi. Hadirnya bonus demografi bagi Indonesia yang sudah di depan mata menyisipkan harapan kemajuan bangsa di berbagai sektor, terutama dalam mengantisipasi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru imbas dari kemajuan teknologi.

B. Gambaran Umum Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun keempat masa tugas tujuh Anggota BNSP periode 2018—2023. Setelah dua tahun didera badai pandemi COVID-19, tahun 2022 menjadi momentum bagi BNSP untuk bangkit dan memulihkan keadaan sebagaimana semangat dan semboyan Presidensi G-20 2022: *"Recover Together, Recover Stronger"*. Konteks pemulihan pada tahun 2022 terlihat dari indikator membaiknya kinerja BNSP, terutama dalam Bidang Lisensi dan Bidang Sertifikasi.

BNSP tengah mengembangkan sistem informasi (Sisfo) berbasis web untuk memperkuat (1) basis data dan informasi BNSP; dan (2) meningkatkan pelayanan sertifikasi berbasis daring. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan dan penggunaan aplikasi berbasis web.

Dari sisi regulasi, BNSP merespons diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV). Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus berbasis pada standar kompetensi kerja.

Dengan demikian, hilir dari revitalisasi ini adalah penyelenggaraan sertifikasi kompetensi/profesi bagi peserta didik dan peserta latih yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi.

Sebagaimana tercantum di dalam Bab V Pasal 16 Perpres Nomor 68/2022 tersebut, "Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilaksanakan melalui: (a) Akreditasi Lembaga; (b) Sertifikasi Kompetensi/profesi bagi peserta didik/peserta latih. Langkah strategis BNSP adalah mempercepat terbentuknya LSP P-1 di lingkungan pendidikan vokasi, baik di SMK maupun perguruan tinggi serta mengembangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di berbagai bidang di LSP P-1.

Gambar 1 Ketua BNSP bersama Menteri Ketenagakerjaan RI.



C. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BNSP

BNSP lahir dari kebutuhan pentingnya meningkatkan kualitas SDM Indonesia di berbagai sektor. Status kelembagaan BNSP adalah badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BNSP berwenang sebagai otoritas sertifikasi personel yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja di Indonesia.

Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas di Indonesia. Merujuk pada sejarah, paradigma baru ini didasari oleh dua prinsip utama, yaitu (1) penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (*demand driven*); dan (2) proses pendidikan dan pelatihan sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (*competency based training/CBT*). Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini mulai dilaksanakan pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Umum KADIN Indonesia. SKB ini juga menjadi tonggak penguatan peran kelembagaan BNSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada tanggal 15 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Terbitnya PP ini menandai babak baru peran strategis BNSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia dan sebagai badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden.

BNSP mengemban tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BNSP melakukan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
2. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
3. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
4. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
5. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antarlembaga, baik nasional maupun internasional di bidang sertifikasi profesi; dan
6. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Struktur BNSP



Kunjung Masehat, S.H., M.M.
Ketua BNSP



Miftakul Azis, M.H.
Wakil Ketua BNSP



Drs. Mulyanto, M.M.
Anggota Bidang Lisensi



Tetty D.S. Ariyanto, S.ST.Par, M.Par
Anggota Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum



Drs. Muhammad Zubair, M.Si. AIIS
Anggota Bidang Pengembangan SDM



Bonardo Aldo Tobing, BSBA
Anggota Bidang Sertifikasi



Henny S. Widyaningsih, M.Si.
Anggota Bidang Data dan Informasi

Struktur Sekretariat BNSP



Fauziah, S.E., M.Si.
Kepala Sekretariat BNSP



Moh. Saeful Hasan, S.T., M.T.
Kepala Bagian Umum



Rinny Syafriadi, S.Sos., M.Si
Koordinator Bidang Hukum, dan Kerjasama



Rusita Danudilaga, S.Kom, M.Si.
Koordinator Bidang Data dan Informasi



Lamria Napitupulu, SE, M.M.
Koordinator Bidang Lisensi



Dra. Nita Dwi Apriliawati, M.Si.
Koordinator Bidang Sertifikasi Kompetensi

D. Struktur Organisasi BNSP

Struktur BNSP sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 2018 terdiri atas tujuh Anggota BNSP, meliputi (1) Ketua merangkap Anggota; (2) Wakil Ketua merangkap Anggota; dan (3) Anggota lima orang. Saat ini ada lima bidang di dalam struktur organisasi BNSP, yaitu (1) Bidang Lisensi; (2) Bidang Sertifikasi; (3) Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama, Hukum, dan Umum; (4) Bidang Data dan Informasi; dan (5) Bidang Pengembangan SDM.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi BNSP periode 2018–2023.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | Kunjung Masehat, S.H., M.M. |
| Wakil Ketua (merangkap Anggota) | Miftakul Azis, M.H. |
| Anggota Bidang Lisensi | Drs. Mulyanto, M.M. |
| Anggota Bidang Sertifikasi | Bonardo Aldo Tobing, BSBA |
| Anggota Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama, Hukum, dan Umum | Tetty D.S. Ariyanto, S.ST. Par, M.Par |
| Anggota Bidang Data dan Informasi | Henny S. Widyaningsih, M.Si. |
| Anggota Bidang Pengembangan SDM | Drs. Muhammad Zubair, M.Si. AIIS |

E. Sekretariat BNSP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 8, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP dibentuk Sekretariat BNSP. Sekretariat BNSP berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua BNSP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi maka struktur Sekretariat BNSP adalah sebagai berikut.

| | |
|---|----------------------------------|
| Kepala Sekretariat | Fauziah, S.E., M.Si. |
| Kepala Bagian Umum | Moh. Saeful Hasan, S.T., M.T. |
| Koordinator Bidang Lisensi | Lamria Napitupulu, SE, M.M. |
| Koordinator Bidang Sertifikasi Kompetensi | Dra. Nita Dwi Apriliawati, M.Si. |
| Koordinator Bidang Hukum dan Kerjasama | Rinny Syafriadi, S.Sos, M.Si |
| Koordinator Bidang Data dan Informasi | Rusita Danudilaga, S.Kom, M.Si |

PROFIL BNSP



A. Sejarah Ringkas BNSP

Cikal bakal berdirinya BNSP bermula dari pembentukan dua lembaga pemerintah pada tahun 1990-an. Lembaga pertama ialah Dewan Latihan Kerja Nasional (DLKN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1990. DLKN bertujuan memberikan rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja tentang peningkatan kualitas tenaga kerja.

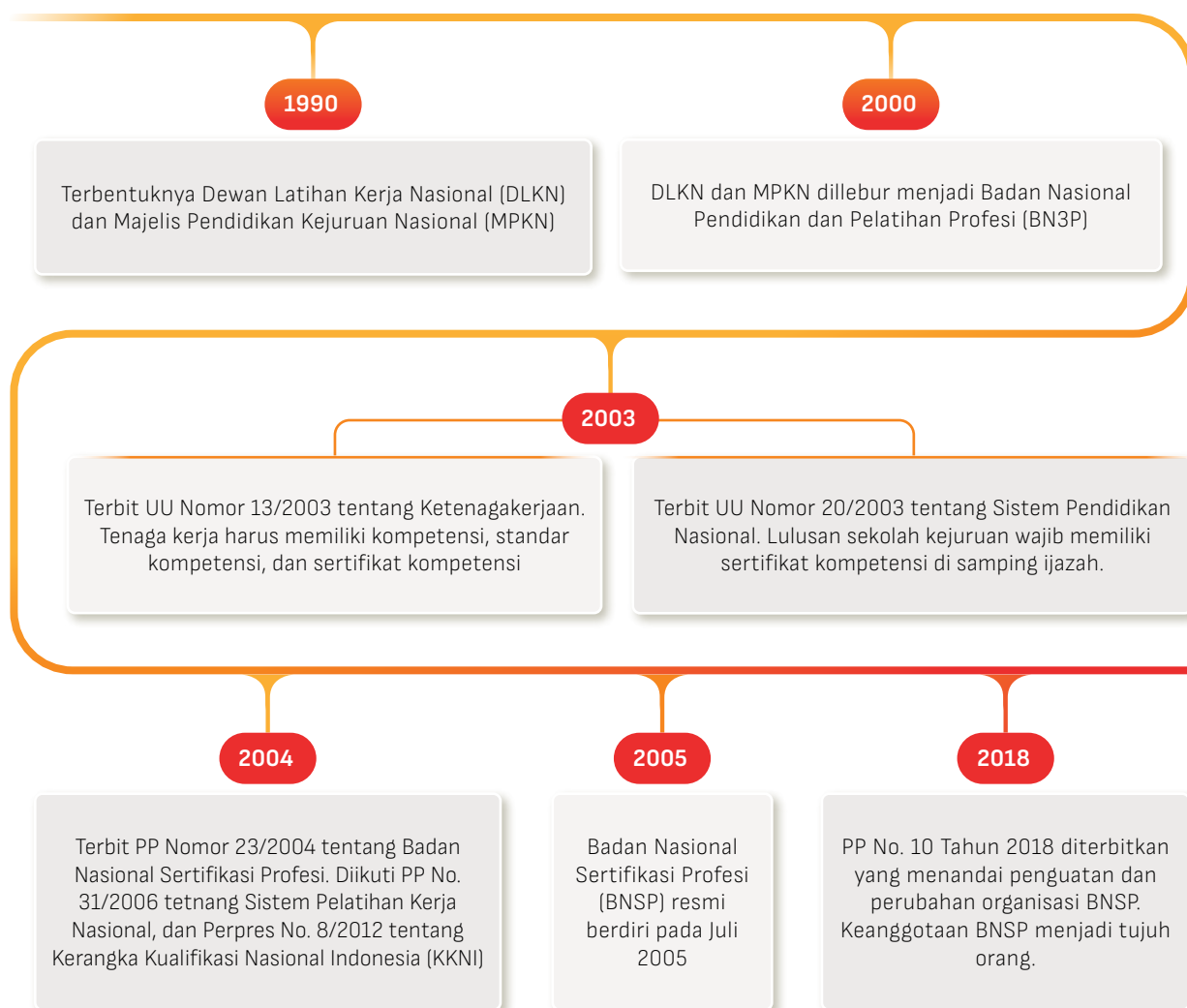
Lembaga kedua adalah Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) yang dibentuk berdasarkan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan KADIN. MPKN bertujuan mewujudkan *link & match* antara pendidikan menengah vokasi (SMK) dan industri.

Mengingat adanya kesamaan tujuan antarkedua lembaga itu maka digagaslah

penyatuan kedua lembaga menjadi Badan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Profesi (BN3P). Pembentukan BN3P dituangkan ke dalam surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Ketua KADIN. SKB ditandatangani secara resmi pada tanggal 15 Mei 2000.

Linimasa Perjalanan Sejarah

Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Gambar 2 Linimasa perjalanan sejarah Badan Nasional Sertifikasi Profesi

BN3P berperan signifikan ketika DPR-RI menggodok RUU Ketenagakerjaan dan Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada bagian mengenai Pelatihan Kerja sangat diwarnai oleh konsep BN3P, yakni keharusan tenaga kerja memiliki kompetensi, standar kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pasal tentang kewajiban lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) memiliki sertifikat kompetensi di samping ijazah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ketiga produk regulasi itu merupakan satu kesatuan Sistem Pengembangan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi. Pada sistem tersebut terdapat tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi, program diklat berbasis kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Setahun setelah PP Nomor 23 Tahun 2004 dikeluarkan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) resmi berdiri pada bulan Juli 2005 yang ditandai dengan pengukuhan keanggotaan BNSP oleh Menteri Tenaga Kerja atas nama Presiden. BNSP merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Di dalam keanggotaan BNSP terdapat unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Selanjutnya, organisasi BNSP mengalami penguatan dan perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32). Presiden Joko Widodo menandatangani PP tersebut pada tanggal 15 Maret 2018. Kemudian, diundangkan Menkum HAM, Yasonna H. Laoly, pada tanggal 16 Maret 2018.

Terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) sebelumnya. Perubahan mendasar dari terbitnya PP ini salah satunya terletak pada jumlah Anggota BNSP yang semula 23 orang menjadi 7 orang.

B. Dasar Hukum Sistem Sertifikasi Kompetensi

BNSP sebagai lembaga negara yang melaksanakan Sistem Sertifikasi Kompetensi secara nasional dilandasi oleh dasar hukum berikut ini.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 108)
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

C. Sarana dan Prasarana

Operasional BNSP didukung oleh Gedung BNSP dan kantor Sekretariat BNSP yang berlokasi di Jalan M.T. Haryono, Kav. 52, Jakarta Selatan. Saat ini, Gedung dan Sekretariat BNSP telah memiliki sarana dan prasarana yang representatif untuk mendukung pelayanan optimal bagi para pemangku kepentingan sertifikasi kompetensi dan publik yang memerlukan informasi seputar sertifikasi kompetensi.

Renovasi Kantor Sekretariat BNSP telah dimulai sejak tahun 2021 hingga rampung pada tahun 2022. Di antara sarana yang tersedia, yaitu ruang rapat, ruang konsultasi, ruang tunggu, lapangan olahraga, ruang laktasi, musala, pos keamanan, dan *rooftop*. Kini sarana dan prasarana tersebut telah digunakan.

Gambar 3 Gedung Badan Nasional Sertifikasi Profesi





1



2



3



4

5

- 1 Gambar 4 Ruang Rapat
- 2 Gambar 5 Ruang tunggu lobby
- 3 Gambar 6 Ruang Rapat
- 4 Gambar 7 Tempat konsultasi
- 5 Gambar 8 Ruang Laktasi
- 6 Gambar 9 Rooftop
- 7 Gambar 10 Aula
- 8 Gambar 11 Toilet



7

8

D. Jenis Layanan BNSP

Berdasarkan fungsinya, BNSP memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan dan publik terkait dalam lingkup enam kegiatan berikut ini.

1. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja

Fungsi ini dijalankan melalui layanan lisensi dan relisensi terhadap LSP, baik LSP P-1, P-2, dan P-3. Selain itu, BNSP memverifikasi pengajuan skema sertifikasi dan penambahan ruang lingkup.

2. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Fungsi ini dijalankan melalui percepatan pembentukan LSP P-1 di SMK dan di perguruan tinggi guna memastikan peserta didik di SMK dan perguruan tinggi mengikuti uji sertifikasi kompetensi di samping ujian kelulusan.

3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional

Fungsi ini dijalankan melalui surveilans terhadap LSP dan penindakan terhadap LSP yang melanggar melalui pencabutan dan pembekuan lisensi. Pembinaan juga dilakukan melalui diklat dan *workshop/lokakarya*.



Gambar 22 Pengembangan Kerja Sama BNSP dengan semua pemangku kepentingan sertifikasi

4. Pelaksanaan dan Pengembangan Kerja Sama Antarlembaga, baik Nasional maupun Internasional di Bidang Sertifikasi Profesi

Fungsi ini dijalankan melalui pembuatan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. BNSP juga aktif dalam kegiatan pengembangan sistem sertifikasi, terutama dengan negara-negara ASEAN.

5. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Terintegrasi

Fungsi ini dijalankan melalui pengembangan sistem data dan informasi digital berbasis web yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sertifikasi dan publik yang berkepentingan.

6. Pengembangan SDM Sertifikasi

Fungsi ini dijalankan melalui pendidikan dan pelatihan untuk master asesor, asesor lisensi, dan asesor kompetensi serta pemberian lisensi kepada para master asesor, asesor lisensi, dan asesor kompetensi.

Bab 3

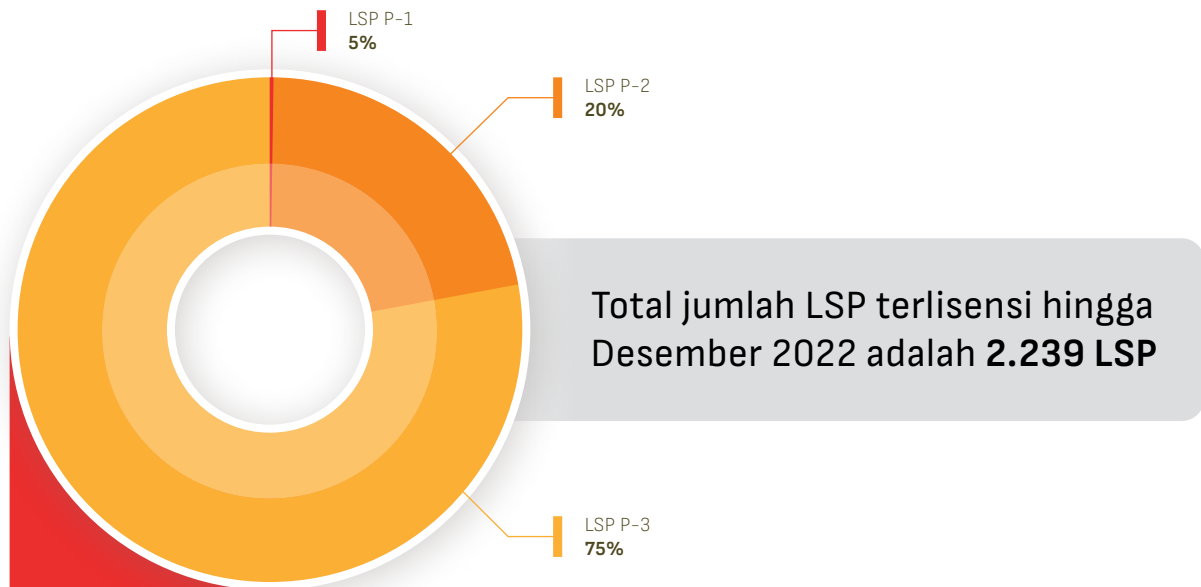
CAPAIAN KINERJA



Bab ini menggambarkan capaian kinerja yang dilakukan oleh bidang-bidang di BNSP, yaitu Bidang Lisensi, Bidang Sertifikasi, Bidang Hukum dan Kerjasama, Bidang Data dan Informasi, serta Bagian Umum. Gambaran kinerja ini menunjukkan perbaikan dan pemulihan secara berangsur-angsur karena mulai melandainya kasus COVID-19. Aktivitas pelayanan BNSP meningkat dan membaik secara bertahap.

A. Kinerja Bidang Lisensi

Kinerja Bidang Lisensi menggambarkan perkembangan tahun 2022 yang mencakup perkembangan LSP, perkembangan skema kompetensi, pelatihan dan lokakarya, serta kegiatan pendukung lainnya.



1. Perkembangan Lembaga Sertifikasi Profesi

Total jumlah LSP terlisensi hingga Desember 2022 adalah 2.239 LSP. Berikut perinciannya.

| | |
|---------|-------|
| LSP P-1 | 1.686 |
| LSP P-2 | 115 |
| LSP P-3 | 438 |

a. Kegiatan Verifikasi LSP Baru

Kegiatan verifikasi LSP baru terdiri atas (1) apresiasi; (2) *full assessment*; dan (3) penyaksian uji kompetensi (*witness*). Tahun 2022 terdapat 186 pengajuan calon LSP (CLSP). Bidang Lisensi menyelenggarakan kegiatan apresiasi terhadap 186 CLSP. Total pelaksanaan *full assessment* (FA) tahun 2022 sebanyak 161 CLSP dan total pelaksanaan penyaksian uji kompetensi (*witness*) dilakukan kepada 161 CLSP.

b. Total LSP Terlisensi 2022

Jumlah LSP terlisensi pada tahun 2022 sebanyak 186 LSP, dengan perincian 95 LSP P-1, 15 LSP P-2, dan 76 LSP P-3.

c. Relisensi LSP 2022

LSP yang mengajukan perpanjangan lisensi (relisensi) sepanjang 2022 tercatat sebanyak 52 LSP.

d. Penambahan Ruang Lingkup LSP 2022

Kegiatan *full assesment* penambahan ruang lingkup (PRL) pada tahun 2022 melibatkan 57 LSP dari berbagai kategori (lihat Lampiran). Adapun *witness* untuk PRL tahun 2022 dilaksanakan pada 77 LSP.

e. Surveilans LSP 2022

Surveilans LSP pada tahun 2022 secara terperinci dilakukan pada LSP P-1 sebanyak 102, LSP P-2 sebanyak 1, dan LSP P-3 sebanyak 51. Total surveilans 154 LSP.

f. Pembekuan dan Pencabutan Lisensi LSP 2022

Sesuai dengan tugas pembinaan dan pengawasan (Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 10/2018), BNSP menindak LSP melalui pembekuan dan pencabutan lisensi. Pembekuan adalah penangguhan lisensi untuk sementara waktu, sedangkan pencabutan lisensi adalah penghapusan LSP secara permanen.



Gambar 23 Anggota BNSP, Bapak Mulyanto melaksanakan *full assesment* kepada LSP Gizi Indonesia

Pembekuan atau pencabutan lisensi ini dilakukan dengan beberapa alasan, di antaranya (1) LSP vakum atau tidak melakukan lagi kegiatan sertifikasi; (2) LSP melakukan pelanggaran berat yang bertentangan dengan Peraturan Kepala BNSP. Total 22 LSP yang terkena keputusan pembekuan dan pencabutan lisensi tahun 2022.

Gambar 24 Ketua BNSP melaksanakan *witness*



2. Perkembangan Skema Sertifikasi

Dari sisi perkembangan skema sertifikasi pada tahun 2022 juga terjadi peningkatan.

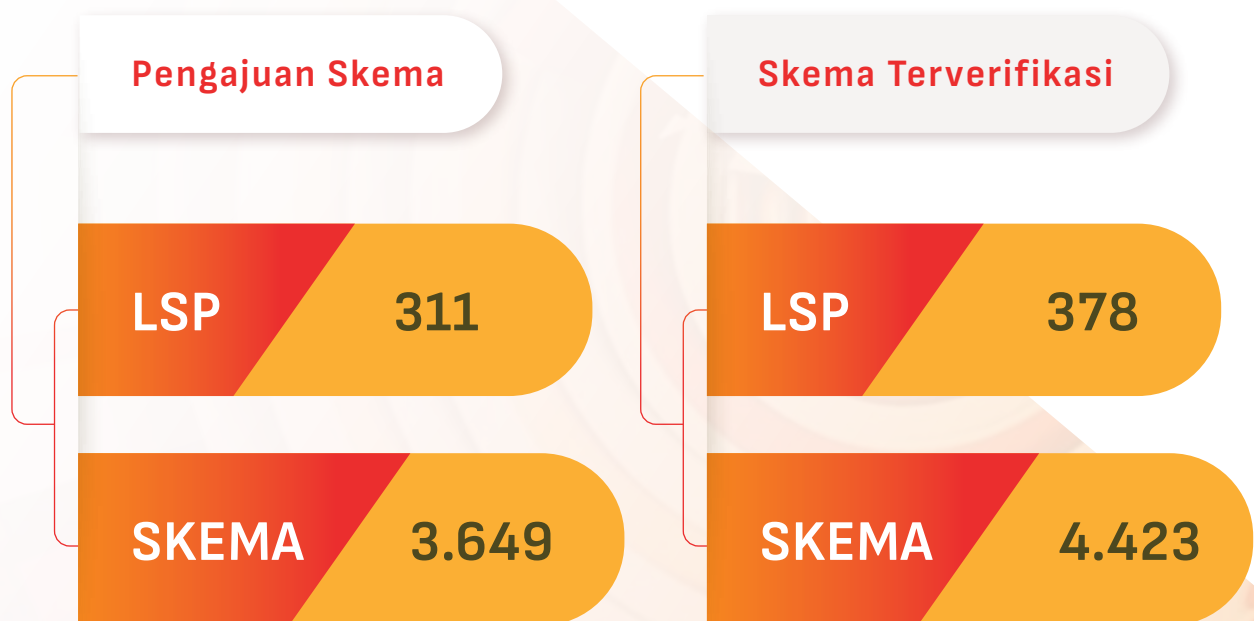
a. Pengajuan Skema dan Verifikasi Skema

Pengajuan skema sertifikasi dilakukan oleh 311 LSP dengan total skema sebanyak 3.649 skema.

b. Skema Terverifikasi 2022

Seiring dengan pengajuan skema baru atau penambahan ruang lingkup (PRL), surat keputusan verifikasi skema diberikan kepada 378 LSP dengan total skema terverifikasi sebanyak 4.423 skema.

Perkembangan Skema Sertifikasi



3. Pelatihan dan Workshop

Bidang lisensi mengadakan beberapa pelatihan sepanjang tahun 2022, yaitu Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan, Pelatihan Auditor SMM, Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen, Pelatihan Asesor Lisensi, dan Workshop Asesor Lisensi.

a. Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan

Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi personel LSP dalam pengelolaan LSP sesuai dengan kebijakan dan pedoman-pedoman BNSP.

Pelatihan diselenggarakan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jl. Gatot Subroto Kav. 1 Jakarta untuk delapan angkatan.

Gambar 25 Pelatihan Pengelolaan LSP



b. Pelatihan Auditor SMM

Tujuan pelatihan ini adalah menghasilkan auditor manajemen mutu yang kompeten sebagai *quality assurance* LSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi. Pelatihan ini diikuti oleh 153 peserta dari 7 lembaga bertempat di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jl. Gatot Subroto Kav. 1 Jakarta. Pelaksanaan dilakukan untuk tiga angkatan. Angkatan I & II: 7–11 Maret 2022 dan Angkatan III: 14–18 Maret 2022.



Gambar 26 Pelatihan Auditor SMM

c. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen LSP

Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi personel LSP dalam penyusunan dokumen LSP sesuai dengan kebijakan dan pedoman-pedoman BNSP. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring, yaitu Angkatan I & II dilaksanakan pada tanggal 6–7 April 2022, Angkatan III & IV dilaksanakan pada tanggal 13–14 April 2022, dan Angkatan V dilaksanakan pada tanggal 20–21 April 2022. Total peserta pelatihan sebanyak 100 orang.

Gambar 27 Bimtek Penyusunan Dokumen LSP secara daring.



d. Pelatihan Asesor Lisensi

Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi asesor lisensi dalam melakukan asesmen dan merekomendasikan lisensi dari BNSP kepada LSP sesuai dengan kebijakan dan pedoman BNSP.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1, RT.2/RW.2, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 7 sampai dengan 11 November 2022. Total peserta pelatihan sebanyak 20 orang.



Gambar 28 Pelatihan Asesor Lisensi

e. Workshop Asesor Lisensi

Tujuan *workshop* ini adalah meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini adalah para asesor lisensi BNSP sesuai dengan kebijakan dan pedoman-pedoman BNSP. Kegiatan

dilaksanakan di Manhattan Hotel Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav. 19-24, Kuningan, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 1-2 November 2022. Total peserta *workshop* sebanyak 150 orang.



Gambar 29 Workshop Asesor Lisensi

4. Kegiatan Pendukung Lain

Kegiatan pendukung lain yang diselenggarakan oleh BNSP adalah pengembangan skema sertifikasi oleh Komite Skema Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Penerbitan skema ini diikuti dengan pengembangan materi uji kompetensi (MUK) untuk ketiga skema tersebut oleh Komite Skema BNSP.

a. Pengembangan Skema Asesor Lisensi dan MUK

Pada Desember 2022 di-sahkan tiga skema sertifikasi untuk asesor lisensi oleh BNSP. Skema sertifikasi ini dijadikan acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi BNSP. Berikut skema jabatan (okupasi) yang telah disusun.

1. Skema Sertifikasi Okupasi Asesor Lisensi Muda;
2. Skema Sertifikasi Okupasi Asesor Lisensi; dan
3. Skema Sertifikasi Okupasi Asesor Kepala.

b. Sertifikasi SDM BNSP

Dalam rangka pengakuan kompetensi asesor lisensi kepala, asesor lisensi, dan asesor lisensi muda BNSP maka perlu dilakukan kegiatan Sertifikasi SDM BNSP. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan mutu asesor lisensi kepala, asesor lisensi, dan asesor lisensi muda BNSP dalam melakukan tugasnya yaitu mengaudit kecukupan terhadap dokumentasi mutu LSP dan melakukan asesmen lapangan ke LSP sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Standar kompetensi yang digunakan mengacu pada Peta Okupasi Nomor KEP. 1821/BNSP/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Penetapan Kemas Okupasi Bidang Sertifikasi Kompetensi.

Jumlah asesor lisensi kepala, asesor lisensi, dan asesor lisensi muda BNSP tahun 2022 berdasarkan SK Nomor 2431/BNSP/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebanyak 200 orang yang terdiri atas asesor lisensi kepala sebanyak 26 orang, asesor lisensi 61 orang, dan asesor lisensi muda sebanyak 113 orang. Dari daftar tersebut yang mendaftar sebanyak 147 orang terdiri atas asesor lisensi kepala 25 orang, asesor lisensi 49 orang, dan asesor lisensi muda sebanyak 73 orang. Setelah dilaksanakan uji kompetensi dinyatakan 76 orang kompeten dan 29 orang belum kompeten.



Gambar 30 Penyerahan sertifikat lisensi LSP Keraton kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X.



Gambar 31 Penyerahan sertifikat lisensi LSP Hino

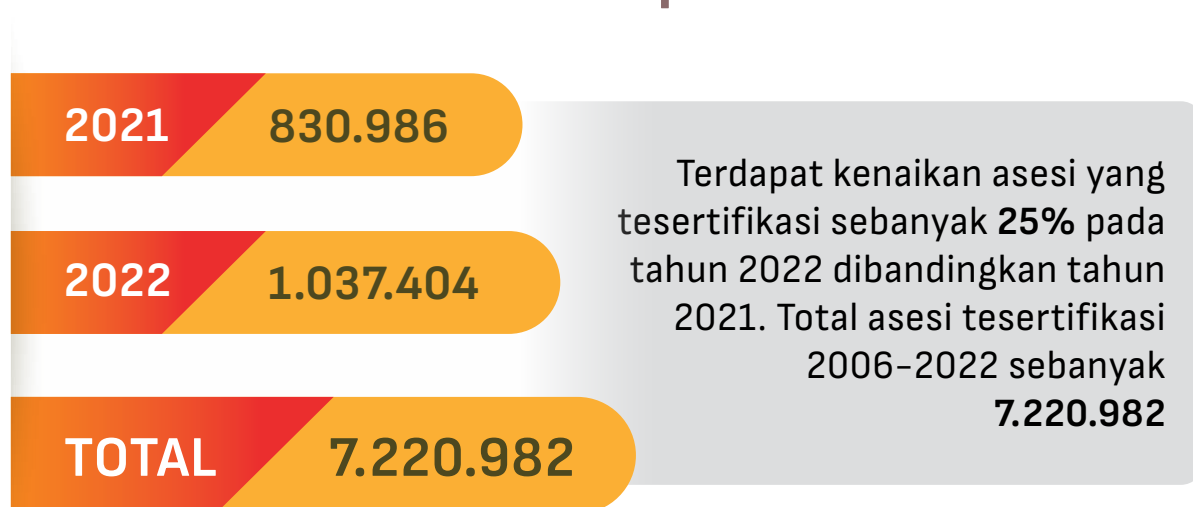


Gambar 32 Penyerahan sertifikat lisensi LSP Pelabuhan

B. Kinerja Bidang Sertifikasi

Kinerja Bidang Sertifikasi menggambarkan perkembangan pada tahun 2022 mencakup perihal jumlah asesi tesertifikasi, pelatihan asesor kompetensi, *recognition curent competency* (RCC), Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK), pelatihan master asesor, pelatihan lead asesor, lokakarya master asesor, sertifikasi CMA, dan data master asesor.

Sertifikasi Kompetensi



1. Sertifikasi Kompetensi 2022

Asesi tesertifikasi sepanjang tahun 2022 sebanyak 1.037.404. Angka ini mengalami lonjakan 25% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 830.986. Kenaikan ini dipicu oleh melandainya kasus COVID-19 dan penambahan target PSKK 2022.

2. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun 2022

Selama program pelaksanaan sertifikasi kompetensi berlangsung sejak pertama digulirkan, kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) merupakan kegiatan yang paling mendongkrak akselerasi sertifikasi kompetensi kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Pemerintah menganggarkan sebanyak 5.712 paket PSKK atau sebanyak 114.240 asesi. Realisasi yang tercapai senilai 5.671 paket PSKK dengan jumlah asesi yang diuji sebanyak 113.420 asesi, dengan rincian 1 paket kegiatan diikuti oleh 20 asesi dan diuji oleh 2 orang asesor.

| | | |
|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Tahap I | Jumlah LSP 611 | Jumlah Paket 5.157 |
| Tahap II | Jumlah LSP 39 | Jumlah Paket 587 |
| Tahap III | Jumlah LSP 22 | Jumlah Paket 135 |

Berdasarkan proses pelaksanaannya, kegiatan PSKK diawali dengan proses sosialisasi secara daring pada tanggal 14–15 Maret 2022 yang diikuti oleh 1.103 LSP. Setelah sosialisasi dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu LSP melakukan pengumpulan proposal PSKK dan verifikasi proposal PSKK.

Berdasarkan hasil verifikasi dan pleno penetapan paket PSKK, Komite Panitia Program PSKK kemudian memutuskan penetapan PSKK sebagai berikut.

Pelaksanaan tersebut dilakukan dalam tiga tahap. Paket yang tidak bisa diselesaikan oleh LSP di tahap pertama, akan dibuka kembali di tahap selanjutnya.

Selanjutnya, untuk menjamin mutu proses uji dalam kegiatan PSKK, BNSP menganggarkan sebanyak 100 paket perjalanan monitoring PSKK dengan 1 paket terdapat 2 petugas monitoring. Pelaksanaan Monitoring PSKK ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap Persiapan/Pelaksanaan dan Tahap Pelaporan.

Kegiatan PSKK tahun 2022 dilakukan dalam kurun waktu sepuluh bulan, yaitu pada bulan Maret s.d. Desember 2022.

3. Pelatihan Asesor Kompetensi 2022

Pelatihan asesor kompetensi telah menjadi kegiatan rutin yang difasilitasi oleh BNSP. Pada tahun 2022 dilaksanakan pelatihan asesor kompetensi, baik dengan pembiayaan APBN Sekretariat BNSP atau pembiayaan mandiri. Pembiayaan mandiri merupakan penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan sendiri oleh LSP, baik secara subsidi maupun membayar kepada calon asesor.

Tujuan dari Pelatihan Asesor Kompetensi adalah untuk memenuhi kebutuhan asesor kompetensi yang terdidik dan terlatih dalam pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP. Selain itu, pelatihan ini juga untuk menyatukan pandangan dalam penilaian dan pelaksanaan uji kompetensi. Setelah pelatihan, calon asesor diuji untuk dinyatakan kompeten sebagai asesor kompetensi.

a. APBN Sekretariat BNSP

Pelatihan asesor kompetensi dengan pembiayaan APBN Sekretariat BNSP dialokasikan untuk 12 paket (240 orang). Pelaksanaan dilakukan pada bulan Maret–Oktober 2022.

b. Pembiayaan Mandiri (LSP)

Pelatihan asesor kompetensi melalui pembiayaan mandiri adalah yang paling banyak dilaksanakan, yaitu sebanyak 551 pelatihan. Pelatihan diselenggarakan oleh LSP dengan membebaskan biaya pelatihan kepada asesi atau memberi subsidi.

Gambar 33 Pelatihan Asesor Kompetensi



4. Recognition Current Competency (RCC) 2022



Gambar 34 Kegiatan Recognition Current Competency (RCC)

Masa berlaku sertifikat asesor kompetensi dibatasi selama tiga tahun sesuai dengan Peraturan Ketua BNSP. Karena itu, sertifikat asesor yang sudah jatuh tempo harus diperpanjang dengan kegiatan RCC atau resertifikasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan asesor terkait dengan perkembangan kebijakan sertifikasi dari BNSP. Selain itu, demi menyatukan kembali pandangan dalam melakukan penilaian dan pelaksanaan uji kompetensi.

- a. **Pembiayaan APBN Sekretariat BNSP**
Kegiatan RCC yang menggunakan dana APBN Sekretariat BNSP dialokasikan untuk 13 paket pada bulan Maret–September 2022.
- b. **Pembiayaan Mandiri (LSP)**
Pelaksanaan RCC secara mandiri juga diselenggarakan oleh LSP sebanyak 576 RCC.

5. Pelatihan Master Asesor

Pertumbuhan jumlah asesor kompetensi yang signifikan harus diimbangi juga oleh ketersediaan master asesor. Untuk itu, BNSP memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Master Asesor. Tahun 2022,

penyelenggaraan Pelatihan Master Asesor diselenggarakan untuk dua angkatan dengan durasi selama 8 hari. Pelaksanaan pada tanggal 1–8 Desember 2022, bertempat di Hotel Best Western Plus Kemayoran, Jakarta.



Gambar 35 Pelatihan Master Asesor Kompetensi BNSP



Gambar 36 Penyerahan Sertifikat Master Asesor

Kegiatan pelatihan master asesor kompetensi diawali dari seleksi asesor kompetensi oleh BNSP sesuai dengan surat Ketua BNSP nomor B.1534/BNSP/X/2022 tentang usulan calon peserta pelatihan master asesor kompetensi tahun 2022. Peserta berjumlah 40 orang yang terbagi dalam Angkatan 1 & 2.

6. Pelatihan *Lead Asesor Kompetensi*



Gambar 37 Kegiatan Pelatihan *Lead Asesor*

Penyelenggaraan pelatihan *lead asesor kompetensi* Angkatan 1 & 2 dilaksanakan selama 7 hari, mulai dari tanggal 8 s.d 14 Desember 2022, bertempat di Hotel Beest Western Plus Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan pelatihan *lead asesor kompetensi* diawali dari seleksi asesor kompetensi dari BNSP sesuai dengan surat ketua BNSP nomor B.1605/BNSP/X/2022 tentang usulan calon peserta pelatihan *lead asesor kompetensi* tahun 2022. Peserta berjumlah 40 orang yang terbagi dalam Angkatan 1 & 2.

7. Workshop Master Asesor

Penyelenggaraan workshop master asesor dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 25 oktober 2022 di

Hotel Artotel Semanggi. Peserta jumlah 200 orang yang terdiri atas Master Asesor dan Calon Master Asesor.



Gambar 38 Workshop Master Asesor

8. Sertifikasi CMA

Pada tanggal 15 s.d. 16 Februari 2022 telah dilaksanakan Sertifikasi Master Asesor di TUK Ruang Rapat

Lantai 2 Gedung BNSP. Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi master asesor berjumlah 14 orang.



Gambar 39 Proses Sertifikasi CMA

9. Data Master Asesor 2022

Berikut ini adalah data Master Asesor Tahun 2022.

Master Asesor

135

Calon Master Asesor

101

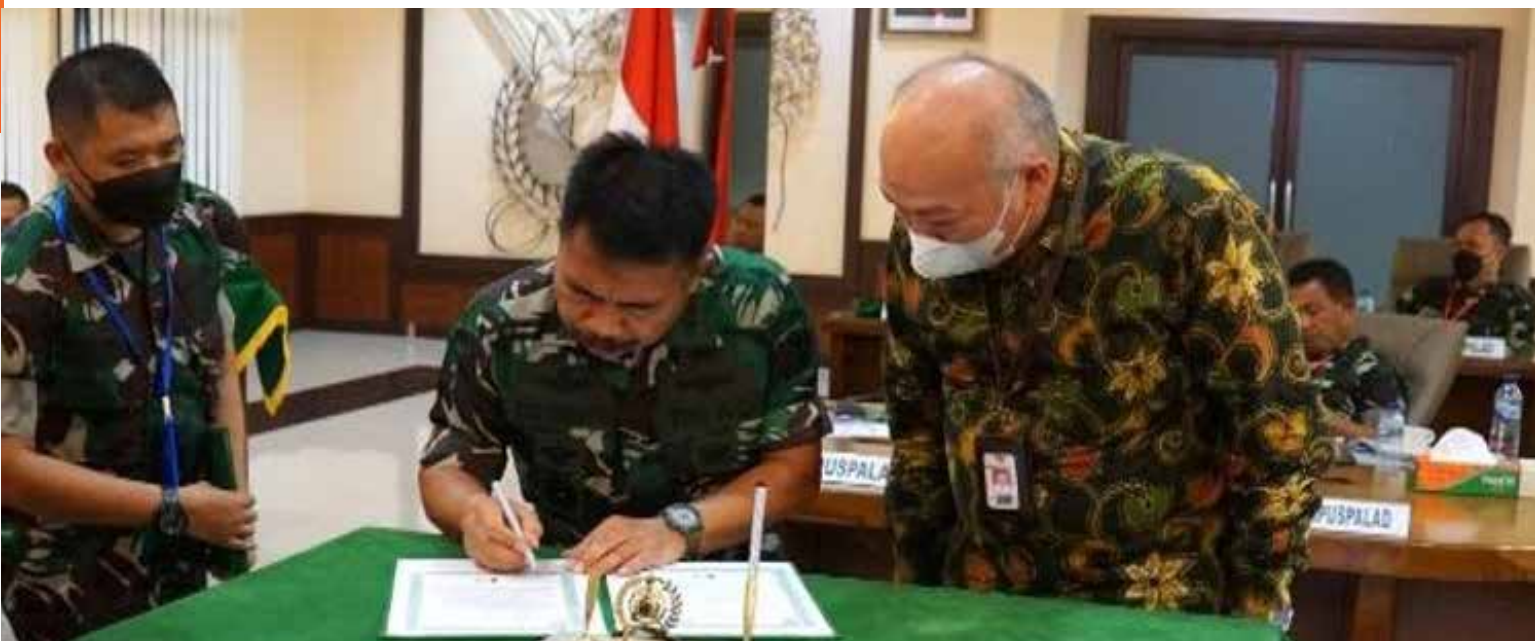
C. Kinerja Bidang Hukum dan Kerjasama

Kinerja Bidang Hukum dan Kerjasama menggambarkan perkembangan kebijakan BNSP dan kerja sama dengan berbagai pihak melalui penandatanganan dokumen kerja sama, yaitu berita acara, perjanjian kerja sama, dan nota kesepahaman.

1. Kerja Sama Antarlembaga/Kementerian



Gambar 40 Kerja Sama dengan LPJK Kementerian PUPR



Gambar 41 Kerja Sama dengan Pusat Peralatan TNI AD



Gambar 42 Kerja Sama dengan KADIN DKI

Sepanjang tahun 2022 telah ditandatangani dokumen kerja sama, yaitu dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Otoritas Jasa Keuangan, dan KADIN DKI.

Dokumen Kerja Sama

Berita Acara Kesepakatan antara LPJK dan BNSP Nomor: 001/BNSP/I/2022 tentang Bentuk/Format dan Konten QR Code Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K)

Berita Acara Kesepakatan antara LPJK dan BNSP Nomor: 002/BNSP/II/2022 tentang Bentuk/Format dan Konten QR Code Sertifikat Kompetensi Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi (ABU)

Perjanjian Kerja Sama antara Kemenparekraf dengan BNSP Nomor: 2.1/002/HK.07.01/II/2022 tentang Kerja Sama Implementasi Asean Mutual Recognition Arrangement Of Tourism Professionals di Indonesia

Dokumen Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat dan BNSP Nomor: 2.1/003/HK.07.01/III/2022 tentang Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di Lingkungan Puspalad

Perjanjian Kerja Sama antara OJK dengan BNSP Nomor: 2.1/004/HK.07.01/IV/2022 tentang Penguatan Kerja Sama Dalam Rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di Sektor Jasa Keuangan

Nota Kesepahaman antara Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2.1/007/HK.07.01/XII/2022 tentang Kerja Sama dalam Rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Sektor Perekonomian di Wilayah DKI Jakarta

Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2022, telah disiapkan dua draf dokumen kerja sama.

2. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral

a. Coordination Meetings for the Mutual Recognition of Skills and the 'Expanded Application of the ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification Systems'

Kerja sama bilateral dan multilateral diwujudkan melalui kunjungan tim BNSP ke Bangkok, Thailand. Agenda kunjungan, yaitu menghadiri "Coordination Meetings for the Mutual Recognition of Skills and the 'Expanded Application of the ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification Systems'". Tempat dan waktu pelaksanaan di Amari Watergate, Bangkok, tanggal 27–28 Oktober 2022.



Gambar 43 Anggota BNSP mengunjungi Bangkok, Thailand



b. Kunjungan ke TESDA, Manila, Filipina

Kunjungan ke Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) dilaksanakan dalam rangka menghadiri rapat Bilateral Harmonization

Coordination for ASEAN Guiding Principles sekaligus melakukan studi banding dengan observasi langsung proses sertifikasi di TESDA. Delegasi BNSP diterima di kantor TESDA, Manila, Filipina pada tanggal 6 s.d. 7 Desember 2022.



3. Diseminasi Peraturan BNSP

Terdapat dua kegiatan diseminasi Peraturan BNSP yang dilakukan sepanjang tahun 2022.

a. Diseminasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI)

Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang dari pegawai BNSP dan Biro Umum Kementerian Tenaga Kerja, bertempat di The Grove Suites, pada 4–5 Agustus 2022. Adapun tujuan kegiatan, yaitu

(1) menyebarluaskan informasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);

(2) mewujudkan sistem informasi kearsipan yang efektif dan efisien di lingkungan BNSP.



Gambar 44 Diseminasi SRIKANDI

b. Diseminasi Peraturan Sertifikasi Kerja Nasional Bidang Konstruksi

Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang bertempat di Luminor Hotel Kota, pada tanggal 12 Desember 2022. Tujuan kegiatan

ini, yaitu menyebarluaskan informasi Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Konstruksi.



Gambar 45 Diseminasi Peraturan BNSP Bidang Konstruksi



Gambar 46 Harmonisasi K/L

4. Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian/Lembaga

BNSP bersama Kemendikbudristek mengadakan harmonisasi sertifikasi. Kegiatan ini bertujuan (1) menginformasikan kebijakan sistem sertifikasi nasional kepada personel Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbudristek; (2) menjelaskan alur proses pemberian lisensi

BNSP kepada LSK; (3) mengidentifikasi hambatan dan permasalahan proses pengajuan lisensi LSP-LSK ke BNSP. Kegiatan diselenggarakan di Hotel Mercure Gatot Subroto, pada tanggal 24 Oktober 2022. Peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 60 orang.

5. ASEAN Guiding Principles (AGP)

Upaya menerapkan AGP-3 dalam bidang sertifikasi terus dilakukan oleh BNSP. Tahun 2022 diselenggarakan kegiatan sebagai berikut.



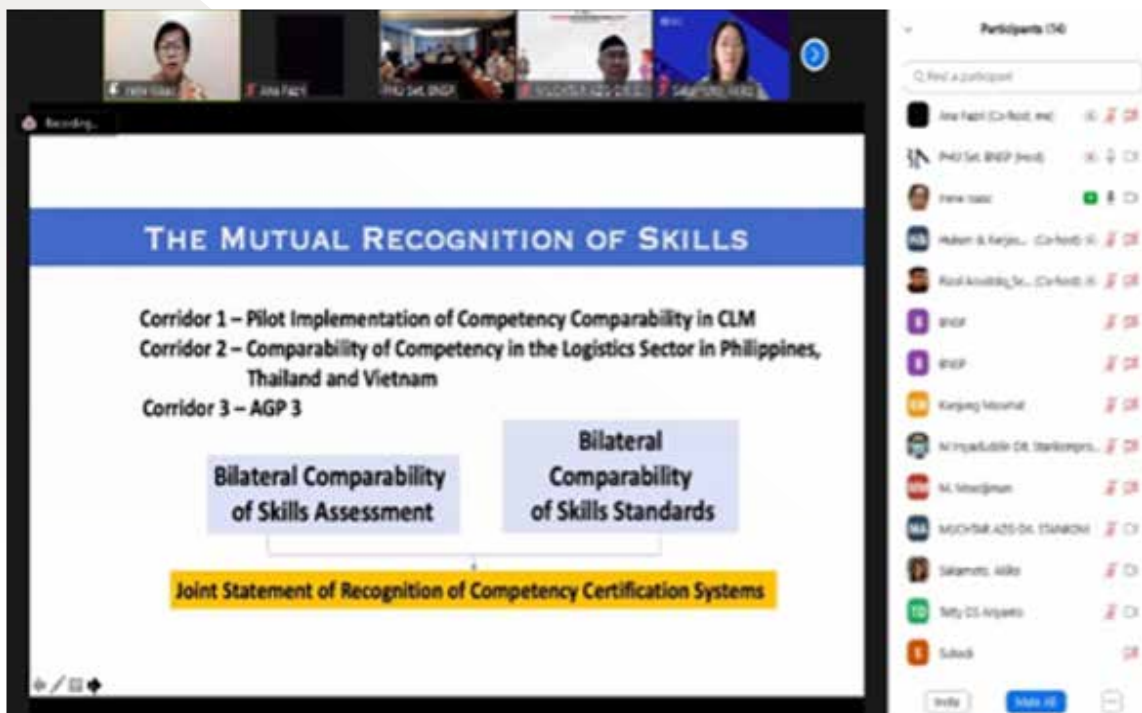
Gambar 47 Rapat pembahasan rencana AGP-3

- a. **Rapat Pembahasan Rencana AGP-3 yang Selaras dengan ASEAN Integration untuk Tenaga Kerja Terampil**
Rapat diikuti 20 orang peserta dari BNSP di JS Luwansa Hotel and Convention Center, pada 2 Agustus 2022.
- b. **Evaluasi Toolbox ASEAN**
Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang dari BNSP di Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, pada 22 September 2022.
- c. **Upgrading Toolbox ASEAN (Training of Trainer Toolbox ASEAN) Angkatan 2**
Kegiatan TOT ini diikuti oleh 20 orang peserta bertempat di Manhattan Hotel, pada 2–4 November 2022.
- d. **Upgrading Toolbox ASEAN (Training of Trainer Toolbox ASEAN) Angkatan 3**
Kegiatan TOT ini diikuti oleh 20 orang peserta bertempat di Manhattan Hotel, pada 2–4 November 2022.

6. Workshop MRS

Kegiatan ini bertajuk “Discussion on the Proposal of Referencing AMS National Skills Testing and Certification System to The WorldSkills Occupational Standards with AGP”. Tujuan kegiatan, yaitu (1) Mempersiapkan proyek *ASEAN Guiding Principles Phase-3* (AGP-3); (2)Memperkuat kerjasama untuk

penjaminan mutu dan pengakuan kompetensi sumber daya manusia profesional di kalangan ASEAN Member States (AMS). Kegiatan diselenggarakan di JS Luwansa Hotel and Convention Center, pada 28 September 2022. Sebanyak 40 orang mengikuti kegiatan ini.



Gambar 48 Pelaksanaan Workshop MRS

7. Penyusunan Revisi Pedoman BNSP



Gambar 49 Rapat penyusunan revisi Pedoman BNSP

Sebanyak lima pedoman BNSP direvisi pada tahun 2022 guna menyeleraskan pedoman dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam Sistem Sertifikasi Nasional. Pedoman yang direvisi sebagai berikut:

- a. Pedoman 201;
- b. Pedoman 202;
- c. Pedoman 208;
- d. Pedoman 301; dan
- e. Pedoman 302.

Kelima pedoman tersebut hingga akhir Desember 2022 telah difinalisasi.

D. Kinerja Bidang Data dan Informasi

Kinerja Bidang Data dan Informasi sepanjang tahun 2022 mencakup beberapa kegiatan dan pengembangan, yaitu (1) Sosialisasi Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi (Sisfo) BNSP; (2) Publikasi dan Promosi BNSP 2022; dan (3) Pengembangan Sistem Informasi (Sisfo); (4) Pelatihan Akun LSP. Berikut ini penjelasan dari setiap kegiatan.



Gambar 50 Tampilan situs web BNSP

1. Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi (Sisfo) BNSP

Sepanjang tahun 2022 dilakukan empat kali sosialisasi terkait dengan Pengelolaan Data Sisfo BNSP di empat lokasi, yaitu Padang, Bali, Yogyakarta, dan Cirebon. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan cara penggunaan sistem informasi BNSP kepada LSP.

| Lokasi | Jumlah Paket | Total Peserta |
|------------|--------------|---------------|
| Padang | 1 paket | 50 |
| Bali | 1 paket | 50 |
| Yogyakarta | 1 paket | 50 |
| Cirebon | 1 paket | 50 |

2. Pameran di Festival Vokasi

BNSP turut serta dalam kegiatan Festival Vokasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tanggal 28–29 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center.



3. Pengembangan Sistem Informasi BNSP

Untuk mendukung transformasi digital BNSP dalam meningkatkan pelayanan sertifikasi maka Bidang Data dan Informasi mengembangkan sebanyak 16 aplikasi pendukung. Aplikasi tersebut dikembangkan, baik berbasis web maupun berbasis sistem operasi Android dan iOS sebagai

bagian dari Sistem Informasi (Sisfo) BNSP. Terdapat empat aplikasi yang merupakan pengembangan baru, yaitu aplikasi PPID, aplikasi Database Skema Sertifikasi, aplikasi Database Pemegang Sertifikasi, dan Aplikasi Surveilans Pemegang Sertifikasi.

Berikut ini ke-16 aplikasi tersebut.

| No. | Aplikasi | Pengguna |
|-----|--|--|
| 1. | Aplikasi e-Office | Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama, Hukum, dan Umum |
| 2. | Aplikasi PPID | |
| 3. | Aplikasi Lisensi | Bidang Lisensi |
| 4. | Aplikasi Database LSP | |
| 5. | Aplikasi Database SDM LSP | |
| 6. | Aplikasi Database Skema Sertifikasi | |
| 7. | Aplikasi Database Standar Kompetensi Kerja | |
| 8. | Aplikasi Database TUK | |
| 9. | Aplikasi Paket Kompetensi | |
| 10. | Aplikasi Database Pemegang Sertifikasi | Bidang Sertifikasi |
| 11. | Aplikasi Pengajuan Blangko Sertifikat | |
| 12. | Aplikasi Asesor Kompetensi | |
| 13. | Aplikasi Surveilans Pemegang Sertifikat | |
| 14. | Aplikasi RCC Asesor Kompetensi | |
| 15. | Migrasi & Integrasi Sistem | Bidang Data dan Informasi |
| 16. | Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif | |

Dengan adanya pengembangan sumber daya digital ini diharapkan proses transfer data dan pengambilan keputusan di BNSP dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan

akuntabel. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan BNSP sebagai basis data dan informasi yang dapat diakses dan terus diperbarui.

4. Pelatihan Pengelolaan Akun LSP

Untuk meningkatkan pengetahuan cara penggunaan sistem informasi BNSP kepada LSP secara intensif maka pada tahun 2022 diadakan sebanyak 50 kali Pelatihan Pengelolaan Akun LSP.

Kegiatan dilaksanakan di 50 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari LSP sebanyak 267 LSP.



Gambar 51 Pelatihan Pengelolaan Akun LSP di Politeknik Batam



Gambar 52 Pelatihan Pengelolaan Akun LSP di Holding BUMN Farmasi

E. Kinerja Bagian Umum

Kinerja Bagian Umum menggambarkan kegiatan tahun 2022 mencakup (1) penggunaan sumber daya anggaran sertifikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) korespondensi; (4) perubahan struktur organisasi; (5) pengembangan aplikasi PPID.



1. Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sertifikasi

Penggunaan sumber daya anggaran sertifikasi pada tahun 2022 dapat dilaporkan sebagai berikut.

Pagu anggaran revisi sebesar Rp98.838.500.000. Target serapan anggaran 2022 adalah 98%. Hingga Desember 2022, realisasi serapan anggaran mencapai Rp93.005.517.074,00 atau 94,10% dari total pagu anggaran.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sangat disadari bahwa BNSP perlu meningkatkan kompetensi pegawai BNSP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Bidang Umum menyelenggarakan beberapa kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh pegawai BNSP.

Kegiatan bimtek selama tahun 2022, yaitu

- Bimtek Penggunaan aplikasi SRIKANDI;
- Bimtek Data *Governance* Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Negara;
- Bimtek Aplikasi SAKTI Modul Persediaan, Aset Tetap, dan Pelaporan; dan
- Bimtek Publikasi dan Pembuatan Bahan Media.

3. Korespondensi

Bidang umum mengelola surat-menyurat resmi dari BNSP, terutama surat edaran. Sampai dengan November 2022 telah dikeluarkan 27 surat edaran dari berbagai Bidang.

4. Perubahan Struktur Organisasi

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, pada Tahun 2022 mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Adapun Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Sekretariat BNSP mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BNSP menyelenggarakan fungsi:

- *penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tata laksana, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara;*
- *penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi, pengelolaan manajemen mutu, dan kerja sama;*

- *pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian lisensi lembaga sertifikasi profesi;*
- *pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian sertifikasi kompetensi kerja; dan*
- *pengelolaan data, informasi dan publikasi, serta pengembangan sistem informasi sertifikasi kompetensi kerja.*

5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelayanan optimal bagi para pemangku kepentingan, instansi terkait dan masyarakat, Sekretariat BNSP terus memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas di lingkungan BNSP, antara lain gedung kantor, ruang rapat, ruang laktasi, ruang perpustakaan, musala, tempat parkir, area resepsionis, dan bilik layanan informasi dan konsultasi.

Selain layanan tersebut, telah dikembangkan pula *desk* layanan PPID bagi masyarakat dan pengunjung yang ingin memperoleh informasi publik. Kemudian, telah dibangun juga sarana *Rooftop* di lantai 4 untuk melengkapi aktivitas rehat bagi pegawai maupun pengunjung nantinya.

6. Pengembangan Aplikasi PPID

BNSP mulai mengembangkan aplikasi PPID pada situs web BNSP pada tahun 2022. Hal ini merupakan salah satu langkah besar BNSP dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif sehingga hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

Selama ini, masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang BNSP dapat mengirimkan permohonan melalui surel BNSP atau datang secara langsung ke kantor BNSP. Namun, setelah adanya aplikasi PPID diharapkan semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang BNSP.



Gambar 53 Sosialisasi PPID

7. Pewujudan e-Office

Selain mengembangkan aplikasi PPID pada tahun 2022, BNSP juga mengembangkan aplikasi e-Office. Aplikasi ini dirancang agar mampu mempercepat proses birokrasi di BNSP sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, penerapan e-Office juga memudahkan pegawai dalam mengelola dokumen surat-menyurat (korespondensi) dan aktivitas perkantoran secara daring.

8. Penghargaan untuk BNSP

BNSP menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 oleh Ombudsman. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di Gedung Ombudsman RI pada tanggal 2 Juni 2022 dan diterima langsung oleh Ketua BNSP.

Ketua BNSP mengapresiasi semua pihak yang terus bahu-membahu dalam memperbaiki kinerja BNSP.

“Untuk mencapai nilai yang lebih baik, masih banyak inovasi yang harus dilakukan oleh BNSP dan Sekretariat BNSP. Semoga di tahun mendatang dapat tetap memberikan pelayanan terbaik untuk *stakeholders* BNSP, sebab tantangan ke depan semakin banyak dan memerlukan inovasi untuk pelayanan publik.” Demikian tutur Ketua BNSP.



Gambar 54 Penghargaan Tokoh Inspirator Vokasi kepada Ketua BNSP



Gambar 55 Penghargaan dari Ombudsman untuk BNSP



PENUTUP

Laporan Kinerja BNSP Tahun 2022 menyiratkan dan menyuratkan langkah optimistis BNSP mengembangkan Sistem Sertifikasi Nasional, salah satunya melalui transformasi dari pelayanan manual kepada pelayanan digital pada semua bidang. COVID-19 yang telah memengaruhi kinerja pada tahun 2020–2021 menjadi pelajaran berharga tentang perlunya kita mengantisipasi perubahan, termasuk perubahan radikal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Apa yang telah direncanakan oleh BNSP pada tahun 2022 telah membuahkan hasil yang signifikan sebagai bekal untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya. Tahun 2023 menjadi tahun terakhir masa bakti Anggota BNSP terpilih periode 2018–2023. Untuk itu, Anggota BNSP dan Kepala Sekretariat beserta segenap koordinator bidang dan pegawai BNSP bahu-membahu melaksanakan tugas dan fungsi BNSP sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Tantangan sertifikasi nasional tahun-tahun ke depan akan semakin kompleks. Untuk itu, transformasi terutama terkait dengan implementasi teknologi digital merupakan tonggak yang harus ditetapkan oleh BNSP sebagai lembaga resmi negara yang menyelenggarakan Sistem Sertifikasi Nasional. Transformasi digital sebagaimana telah dilaporkan diawali dengan pengembangan aplikasi berbasis web untuk semua bidang BNSP. Pengembangan dan penggunaan aplikasi ini semata-mata untuk meningkatkan pelayanan BNSP secara akurat, cepat, dan hemat.

Tantangan di depan mata dalam konteks pembangunan SDM yang kompeten adalah Bonus Demografi Indonesia ketika

Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang sangat tinggi. Bonus demografi tersebut diprediksi akan berlangsung hingga tahun 2030. Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui SDM-nya.

Salah satu kuncinya adalah penyiapan tenaga kerja yang kompeten di segala bidang, terutama bidang-bidang yang menghasilkan pekerjaan baru seperti ditengarai oleh Presiden Joko Widodo. Ada bidang pekerjaan yang punah, tetapi ada pula bidang pekerjaan baru yang bertumbuh kembang, terutama terkait dengan teknologi informasi dan komputer.

BNSP berpacu dengan waktu untuk menyiapkan SDM yang kompeten melalui penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Untuk itu, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) direspons BNSP dengan mendorong berdirinya LSP P-1 di SMK dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Demikian pula sertifikasi kompetensi untuk penyelenggara pelatihan berbasis kompetensi.




Gambar 56 Pimpinan dan segenap ASN BNSP siap menghadapi tantangan transformasi.

BNSP juga perlu mengikuti perkembangan sertifikasi yang terjadi di dunia internasional. Untuk itu, pada tahun 2022 telah dilakukan studi banding ke beberapa negara dan keikutsertaan Anggota BNSP dan tim dalam forum-forum sertifikasi kompetensi internasional, terutama di lingkup ASEAN.

Tahun depan Anggota BNSP dan segenap ASN BNSP akan menyempurnakan kinerja penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Sertifikasi Nasional sebagai tahun terakhir masa bakti Anggota BNSP periode 2018–2023. Pertumbuhan jumlah LSP terlisensi dan asesori tersertifikasi tentu menjadi target utama BNSP, di samping penyediaan sumber daya sertifikasi yang bertambah signifikan, seperti master asesor, asesor lisensi, dan asesor.

Langkah BNSP melakukan transformasi dari cara kerja manual/analog menuju digitalisasi tentu akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja BNSP pada tahun-tahun ke depan. Untuk itu, BNSP pun mengimbangnya dengan meningkatkan kompetensi pegawai BNSP guna menghadapi tantangan transformasi, terutama terkait dengan budaya kerja. Bagaimanapun transformasi akan sulit dilakukan tanpa diikuti dengan penyesuaian budaya kerja dan adaptasi terhadap teknologi baru.

Demikian Laporan Kinerja BNSP Tahun 2022 ini kami persembahkan sebagai catatan untuk analisis dan evaluasi pada perencanaan kerja tahun mendatang. Semoga BNSP semakin maju dan memberikan kontribusi signifikan bagi lahirnya SDM-SDM unggul Indonesia di berbagai sektor..

An abstract graphic design featuring a complex arrangement of overlapping, layered geometric shapes in shades of blue, yellow, and orange. The shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some elements appearing to curve or spiral. The overall composition is dynamic and modern, set against a background that transitions from a light grey to a vibrant orange.

**DATA
INFOGRAFIK
BNSP**

SUMBER DAYA SERTIFIKASI

Tahun 2022



* Data berdasarkan yang teregistrasi di sistem dan situs web BNSP hingga Desember 2022. Perubahan jumlah mungkin terjadi karena beberapa faktor.

SEBARAN ASESOR

Tahun 2022

TOTAL 60.217



| PROVINSI | JUMLAH |
|----------------------|--------|
| DI ACEH | 548 |
| SUMATRA UTARA | 1.226 |
| SUMATRA BARAT | 1.737 |
| RIAU | 872 |
| KEPULAUAN RIAU | 561 |
| BENGKULU | 169 |
| JAMBI | 227 |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 238 |
| SUMATRA SELATAN | 989 |
| LAMPUNG | 845 |
| BANTEN | 2.215 |
| DKI JAKARTA | 6.584 |

| PROVINSI | JUMLAH |
|---------------------|--------|
| JAWA BARAT | 11.240 |
| JAWA TENGAH | 9.006 |
| JAWA TIMUR | 10.777 |
| DI YOGYAKARTA | 2.664 |
| BALI | 1.957 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 591 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 341 |
| KALIMANTAN BARAT | 600 |
| KALIMANTAN UTARA | 81 |
| KALIMANTAN TENGAH | 227 |
| KALIMANTAN TIMUR | 1.157 |
| KALIMANTAN SELATAN | 945 |

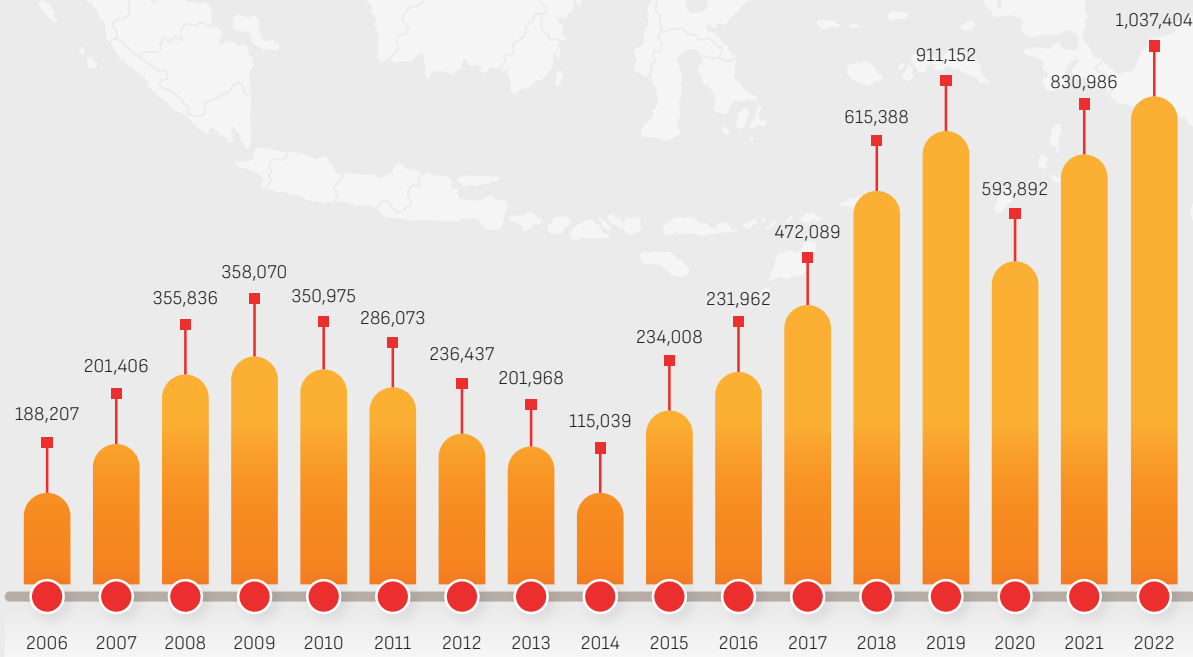
| PROVINSI | JUMLAH |
|-------------------|--------|
| SULAWESI BARAT | 181 |
| SULAWESI SELATAN | 1.808 |
| SULAWESI TENGAH | 107 |
| SULAWESI TENGGARA | 123 |
| SULAWESI UTARA | 387 |
| GORONTALO | 89 |
| MALUKU | 242 |
| MALUKU UTARA | 82 |
| PAPUA | 297 |
| PAPUA BARAT | 146 |

* Data berdasarkan yang teregistrasi di sistem BNSP Desember 2022

SERTIFIKASI TENAGA KERJA

Tahun 2006-2022

TOTAL
7,220,892



Sumber: Data BNSP, Desember 2022

